

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN
DAN PEKERJA TERHADAP PDRB DI JAWA
TENGAH 2007-2009**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

IZZATUL ULFI S.
NIM. C2B007029

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Izzatul Ulfi S.
NIM : C2B 007 029
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN
PEKERJA TERHADAP PDRB DI JAWA TENGAH
2007-2009**
Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc, Ph.D

Semarang, 25 Oktober 2011

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc, Ph.D

NIP . 19581121984031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Izzatul Ulfi S.
NIM : C2B 007 029
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN
PEKERJA TERHADAP PDRB DI JAWA TENGAH
2007-2009**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc., PhD.

Telah Dinyatakan Lulus Ujian Pada Tanggal 4 November 2011

Tim Penguji :

- 1) Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc., Ph.D (.....)
- 2) Johanna Maria K, SE., M.Ec., Ph.D (.....)
- 3) Evi Yulia P, SE., M.Si (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi

Anis Chariri, S.E., MCom., Akt., Ph.D

NIP : 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Izzatul Ulfi S.**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah 2007-2009**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 November 2011

Yang membuat pernyataan,

Izzatul Ulfi S.

NIM : C2B 007 029

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa (*output*) di tempat dan waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah tergolong rendah yaitu dibawah 5 persen sehingga untuk meningkatkan *output* dibutuhkan sumber pendapatan dan pekerja. Sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan beberapa tahun ini mengalami fluktuasi. Dana perimbangan dan pekerja digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan *output* sampai pada batas tertentu.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah periode 2007-2009. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect model*). Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi pola antar wilayah di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

Kata Kunci : PDRB, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja

ABSTRACT

Economic growth is defined as an increasing ability of economy in producing goods and services (output) in particular place and time. Economic growth is one of the indicators of economic development. Economic growth and Gross Domestic Regional Product (GDRP) of municipalities/cities in Central Java is relatively low, at below 5 persen. In order to enhance the output, it needs source of income and employment. Largest source of local revenue derived from Balanced Fund. Recent years has fluctuated. This fund and employment used as production factor to increase output to certain extent.

The purpose of this study is to analyze the effect of Balance Fund as (natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund) and employment to Gross Domestic Regional Product (GDRP) of Central Java, 2007-2009. This research use regression analysis by Fixed Effect model. The use of dummy region in this study helps to observe variations of pattern in Central Java.

The results obtained from data analysis show that natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, employment has positive and significant impact on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in Central Java

Keyword : GDRP, Balanced Funds, natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, employment

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah 2007-2009”. Adapun maksud dari. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D.
2. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D selaku Pembantu Dekan III sekaligus sebagai dosen pembimbing terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan dan petunjuk dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
3. Ibu Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku Dosen Wali atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan

dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.

5. Terima kasih kepada seluruh staf BPS Jawa Tengah yang dengan ramah membantu penulis melengkapi data penelitian.
6. Kedua orang tua terima kasih atas curahan doa, bantuan, perhatian, diskusi dan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan IESP angkatan 2007 dan seluruh sahabat terutama Medi, Riris, Nisa, Putri F, Puput, okta, Danti dan lainnya yang tidak dapat diketik satu persatu terima kasih telah membantu dalam masa perkuliahan selama ini.
8. Rekan-rekan pengurus MPM periode 2008/2009 atas segala pengalaman dan kerjasamanya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca umumnya dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi.

Semarang, 4 November 2011

Izzatul Ulfi Sarinastiti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK... ..	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto	20
2.1.3 Fungsi Produksi.....	27
2.1.4 Pendapatan Daerah	28

2.1.5 Dana Perimbangan	31
2.1.5.1 Dana Bagi Hasil.....	31
2.1.5.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	34
2.1.5.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	39
2.1.6 Hubungan Dana Perimbangan terhadap PDRB	38
2.1.7 Angkatan Kerja.....	40
2.1.8 Hubungan Angkatan Kerja yang tergolong bekerja terhadap PDRB	42
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Pemikiran.....	50
2.4 Hipotesis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	55
3.1.1 Variabel Penelitian.....	55
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	55
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.3 Metode Analisis	59
3.3.1 Spesifikasi Model.....	60
3.3.2. Analisis Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model...	60
3.3.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	69
3.3.3.1 Deteksi Multikolinearitas.....	69
3.3.3.2 Deteksi Autokorelasi.....	70
3.3.3.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	72

3.3.3.4 Deteksi Normalitas	73
3.3.4 Pengujian Hipotesis.....	74
3.3.4.1 Uji F.....	74
3.3.4.2 Uji t.....	75
3.3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	77
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	79
4.1.1 Keadaan Geografis	79
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	80
4.1.3 Keadaan dan Perkembangan PDRB Jawa Tengah.....	81
4.1.4 Dana Perimbangan	85
4.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	89
4.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)	96
4.1.7 Dana Alokasi Khusus (DAK)	100
4.1.8 Pekerja.....	109
4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	112
4.2.1 Deteksi Multikolinearitas.....	112
4.2.2 Deteksi Autokorelasi.....	113
4.2.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	114
4.2.4 Deteksi Normalitas.....	115
4.3 Pengujian Hipotesis.....	116
4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	116
4.3.2 Uji signifikansi Individual (Uji t).....	117

4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	119
4.4 Interpretasi Hasil.....	120
4.4.1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB.....	122
4.4.2 Dana Alokasi Umum terhadap PDRB	124
4.4.3 Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB.....	125
4.4.4 Pekerja terhadap PDRB.....	127
4.4.5 Interpretasi Individual Effect pada Model FEM.....	128
BAB V PENUTUP	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Keterbatasan.....	131
5.3 Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Jawa Tengah 2007-2009.....	2
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2007-2009	3
Tabel 1.3 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2007-2009.....	5
Tabel 1.4 Proporsi Dana Perimbangan Terhadap APBD Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2007-2009.....	7
Tabel 1.5 Proporsi BHPBP, DAU, DAK terhadap APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah 2007-2009.....	9
Tabel 1.6 Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2007-2009.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 4.1 Laju dan Rasio PDRB menurut Sektor Ekonomi Jawa Tengah 2007-2009.....	80
Tabel 4.2 Rasio PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah.....	84
Tabel 4.3 Rasio BHPBP, DAU, DAK terhadap Dana Perimbangan di Jawa Tengah 2007-2009.....	87
Tabel 4.4 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak di Jawa Tengah 2007-2009.....	91
Tabel 4.5 Rasio Migas, Kehutanan, Pertumbuhan, Perikanan terhadap Total DBH Pajak di Jawa Tengah 2007.....	93
Tabel 4.6 Penetapan dan Rasio DBH Bukan Pajak di Jawa Tengah 2008.....	95
Tabel 4.7 Rasio DAU untuk Belanja Daerah 2009.....	98

Tabel 4.8 Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja 2007.....	99
Tabel 4.9 Rasio DAK di Jawa Tengah 2007.....	102
Tabel 4.10 Rasio DAK di Jawa Tengah 2008.....	104
Tabel 4.11 Rasio DAK di Jawa Tengah 2009	106
Tabel 4.12 Rasio Bekerja, Mencari Kerja terhadap Angkatan Kerja.....	111
Tabel 4.13 Deteksi Multikolinearitas R^2 <i>Auxillary Regression</i>	112
Tabel 4.14 Hasil Uji Gletser.....	114
Tabel 4.15 Hasil Uji Park.....	114
Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t).....	117
Tabel 4.17 Hasil Regresi.....	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 3.1 Aturan Membandingkan Uji <i>Durbin-Watson</i> dengan Tabel <i>Durbin Watson</i>	72
Gambar 4.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009.....	82
Gambar 4.2 Dana Perimbangan Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009	86
Gambar 4.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009.....	90
Gambar 4.4 Dana Alokasi Umum Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009	97
Gambar 4.5 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009.....	101
Gambar 4.6 Hasil Uji <i>Durbin Watson</i>	113
Gambar 4.7 Hasil Uji <i>Jarque-Bera</i>	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Data-Data	138
Lampiran B. Hasil Regresi dan Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	151
Lampiran C Rincian Dana Perimbangan.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal pada intinya memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayahnya. Implikasi yang diharapkan adalah pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan aspek perekonomian, desentralisasi fiskal berujung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah. Menurut Dewi Pusporini (2006) salah satu indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah *output*. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu langkah utama yang dapat ditempuh melalui peningkatan *output* daerah.

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Boediono (1992) salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan domestik regional bruto adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. domestik namun bukan satu satunya indikator pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu

gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu.

Pertumbuhan ekonomi domestik Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Pendapatan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Melalui PDRB atas dasar harga konstan dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah (PDRB Jawa Tengah). Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Jawa Tengah 2007-2009

Tahun	PDRB ADHK (juta)	Laju PDRB (%)
2006	150.682.654,74	-
2007	159.110.253,77	5,593
2008	167.790.369,85	5,455
2009	175.685.267,56	4,705

Sumber: data diolah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 175.685.267,56 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode 2007-2009 mengalami penurunan. Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,138 persen dari tahun sebelumnya dan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Terjadi penurunan karena masih terkenanya dampak krisis global pada tahun 2007. Hal yang sama dapat dilihat pada PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah dibawah ini:

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2000
di Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Rupiah)

Kabupaten/kota	Tahun		
	2007	2008	2009
Kab.Cilacap	11.140.846.350.000	11.689.092.900.000	12.303.308.340.000
Kab.Banyumas	3.958.645.950.000	4.171.468.950.000	4.400.542.230.000
Kab.Purbalingga	2.143.746.230.000	2.257.392.770.000	2.384.014.040.000
Kab.Banjarnegara	2.495.785.820.000	2.619.992.610.000	2.753.939.730.000
Kab.Kebumen	2.572.062.880.000	2.721.254.090.000	2.828.395.070.000
Kab.Purworejo	2.591.535.380.000	2.737.087.130.000	2.872.723.790.000
Kab.Wonosobo	1.679.149.650.000	1.741.148.310.000	1.811.092.680.000
Kab.Magelang	3.582.647.650.000	3.761.388.590.000	3.938.764.680.000
Kab.Boyolali	3.748.102.110.000	3.899.372.860.000	4.100.520.260.000
Kab.Klaten	4.394.688.020.000	4.567.200.960.000	4.761.018.670.000
Kab.Sukoharjo	4.330.992.900.000	4.540.751.530.000	4.756.902.500.000
Kab.Wonogiri	2.657.068.890.000	2.770.435.780.000	2.901.577.440.000
Kab.Karanganyar	4.654.054.500.000	4.900.690.400.000	5.076.549.870.000
Kab.Sragen	2.582.492.480.000	2.729.450.320.000	2.893.427.190.000
Kab.Grobogan	2.799.700.550.000	2.948.793.800.000	3.097.093.250.000
Kab.Blora	1.811.864.010.000	1.913.763.350.000	2.010.908.670.000
Kab.Rembang	1.999.951.160.000	2.093.412.590.000	2.186.736.490.000
Kab.Pati	3.966.062.170.000	4.162.082.370.000	4.357.144.040.000
Kab.Kudus	11.243.359.380.000	11.683.819.730.000	12.125.681.790.000
Kab.Jepara	3.722.677.820.000	3.889.988.850.000	4.085.438.360.000
Kab.Demak	2.677.366.770.000	2.787.524.020.000	2.901.151.510.000
Kab.Semarang	4.871.444.250.000	5.079.003.740.000	5.300.723.410.000
Kab.Temanggung	2.143.221.220.000	2.219.155.630.000	2.309.841.530.000
Kab.Kendal	4.625.455.570.000	4.822.465.280.000	5.020.087.370.000
Kab.Batang	2.092.973.930.000	2.169.854.550.000	2.250.616.820.000
Kab.Pekalongan	2.834.685.010.000	2.970.214.980.000	3.098.072.640.000
Kab.Pemalang	2.993.296.760.000	3.142.808.700.000	3.293.056.250.000
Kab.Tegal	3.120.395.640.000	3.286.263.440.000	3.466.785.570.000
Kab.Brebes	4.769.145.460.000	4.998.528.190.000	5.247.897.410.000
Kota Magelang	946.098.160.000	993.835.200.000	1.044.650.240.000
Kota Surakarta	4.304.287.370.000	4.549.342.950.000	4.817.877.630.000
Kota Salatiga	792.680.440.000	832.154.880.000	869.452.990.000
Kota Semarang	18.142.639.970.000	19.156.814.290.000	20.057.621.850.000
Kota Pekalongan	1.820.001.210.000	1.887.853.700.000	1.966.751.150.000
Kota Tegal	1.109.438.210.000	1.166.587.870.000	1.225.424.730.000
∑Kab/kota	135.318.563.870.000	141.860.995.310.000	148.515.790.190.000
Provinsi	23.791.689.900.000	25.929.374.540.000	27.169.477.370.000
Rata-Rata Kab/kot	3.866.244.682.000	4.053.171.208.857	4.243.226.870.857

Sumber : PDRB Jawa Tengah 2007-2009 diolah

Dilihat dari Tabel 1.2 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 13 kabupaten/kota yang memiliki PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah. Sedangkan 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih berada di bawah rata-rata PDRB Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang. Sedangkan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih berada di bawah rata-rata PDRB Jawa Tengah adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Sehingga sebagian besar wilayah yang ada di Jawa Tengah masih memiliki tingkat *output* yang rendah.

Tabel 1.3 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009 tergolong rendah, yaitu masih di bawah 5 persen. Hal itu menunjukkan kemampuan daerah masih tergolong rendah. Hanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kota Magelang,

Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal. Pada tahun 2007 Kabupaten Banyumas memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 6,189. Tahun 2008 Kabupaten Kebumen memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 5,8 persen. Sedangkan tahun 2009 Kota Surakarta memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 5,903 persen.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2000
di Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (persen)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
Kab.Cilacap	4,866	4,921	5,255
Kab.Banyumas	5,296	5,376	5,491
Kab.Purbalingga	6,189	5,301	5,609
Kab.Banjarnegara	5,011	4,977	5,112
Kab.Kebumen	4,521	5,800	3,937
Kab.Purworejo	6,083	5,616	4,956
Kab.Wonosobo	3,579	3,692	3,854
Kab.Magelang	5,206	4,989	4,716
Kab.Boyolali	4,079	4,036	5,158
Kab.Klaten	3,312	3,925	4,244
Kab.Sukoharjo	5,110	4,843	4,760
Kab.Wonogiri	5,070	4,267	4,734
Kab.Karanganyar	5,743	5,299	3,588
Kab.Sragen	5,728	5,691	6,008
Kab.Grobogan	4,370	5,325	5,029
Kab.Blora	3,953	5,624	5,076
Kab.Rembang	3,809	4,673	4,458
Kab.Pati	5,191	4,942	4,687
Kab.Kudus	3,329	3,918	3,782
Kab.Jepara	4,745	4,494	5,024
Kab.Demak	4,154	4,114	4,076
Kab.Semarang	4,716	4,261	4,365
Kab.Temanggung	4,033	3,543	4,087
Kab.Kendal	4,308	4,259	4,098
Kab.Batang	3,495	3,673	3,722
Kab.Pekalongan	4,586	4,781	4,305
Kab.Pemalang	4,475	4,995	4,781
Kab.Tegal	5,588	5,316	5,493
Kab.Brebes	4,789	4,810	4,989
Kota Magelang	5,173	5,046	5,113
Kota Surakarta	5,821	5,693	5,903
Kota Salatiga	5,389	4,980	4,482
Kota Semarang	5,981	5,590	4,702
Kota Pekalongan	3,798	3,728	4,179
Kota Tegal	5,210	5,151	5,044
Provinsi	10,144	8,985	4,782
Rata-Rata PDRB kab/kot	4,763	4,790	4,709

Sumber : PDRB Jawa Tengah 2007-2009 diolah

Untuk meningkatkan *output* kabupaten/kota maka dibutuhkan sumber pembiayaan. Salah satu pembiayaan berasal dari transfer pemerintah yaitu dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA), DAU, dan DAK. Dana Perimbangan sebagai faktor produksi modal yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah guna meningkatkan *output*. Adanya peningkatan *output* dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Proporsi Dana Perimbangan dapat di lihat pada Tabel 1.4 pada era otonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah belum menunjukkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunannya. Proporsi Dana Perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009 terhadap APBD mengalami fluktuasi. Walaupun pada tahun 2008 Dana perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2009 alokasi Dana Perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan kembali. Rata-rata proporsi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat pada tahun 2007 sebesar 83,463 persen kemudian menurun pada tahun 2008 menjadi 81,312 persen dan naik kembali pada tahun 2009 menjadi 84,157 persen. Sehingga proporsi untuk PAD dan pendapatan lain-lain yang sah untuk tahun 2007 hanya sebesar 16,537 persen kemudian meningkat pada tahun 2008 sebesar 18,688 persen dan turun kembali pada tahun 2009 sebesar 15,843 persen.

Tabel 1.4
Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD
Kabupaten/kota Jawa Tengah 2007-2009 (persen)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
Kab.Cilacap	85,181	81,128	85,256
Kab.Banyumas	82,304	79,529	82,720
Kab.Purbalingga	84,856	79,929	79,136
Kab.Banjarnegara	84,767	85,306	87,410
Kab.Kebumen	85,731	84,005	86,328
Kab.Purworejo	85,929	85,783	88,386
Kab.Wonosobo	85,715	85,276	87,471
Kab.Magelang	82,983	81,310	86,189
Kab.Boyolali	85,038	85,814	83,772
Kab.Klaten	89,170	87,173	87,771
Kab.Sukoharjo	87,008	85,553	87,763
Kab.Wonogiri	88,391	83,889	87,335
Kab.Karanganyar	83,737	77,577	86,280
Kab.Sragen	79,609	79,368	83,143
Kab.Grobogan	84,106	84,738	88,432
Kab.Blora	88,925	86,655	88,276
Kab.Rembang	85,694	83,867	85,286
Kab.Pati	83,347	80,624	85,888
Kab.Kudus	78,312	76,288	75,220
Kab.Jepara	79,858	81,487	83,289
Kab.Demak	84,805	83,713	87,568
Kab.Semarang	80,792	79,423	81,794
Kab.Temanggung	87,008	86,291	86,574
Kab.Kendal	82,125	81,588	85,125
Kab.Batang	86,992	84,793	89,048
Kab.Pekalongan	87,301	83,554	86,632
Kab.Pemalang	84,391	83,375	87,051
Kab.Tegal	84,106	84,055	86,488
Kab.Brebes	86,124	84,080	83,145
Kota Magelang	84,923	83,718	81,557
Kota Surakarta	75,034	68,338	68,905
Kota Salatiga	83,676	70,920	83,173
Kota Semarang	65,958	66,227	67,542
Kota Pekalongan	80,874	75,181	88,055
Kota Tegal	78,062	75,361	77,478

Sumber : data diolah

Sesuai dengan Tabel 1.4 Dana Perimbangan atau transfer dana dari pusat masih menjadi sumber penerimaan dominan bagi daerah. Tingginya proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan pada pemerintah pusat berakibat pada peran otonomi daerah tidak berjalan dengan optimal.

Menurut hasil penelitian Bintoro Rianto (2002) hasil Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat PDRB. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui *output*. Hasil simulasi menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan akan memberikan peningkatan *output* untuk tiap daerah di Indonesia. Dan kemudian diperkuat oleh penelitian dari Pusporini Dewi (2006) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan *output* sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Besar proporsi dari masing-masing komponen dana perimbangan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan fiska, kapasitas fiskal maupun alokasi dasar dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Alokasi proporsi dari Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5
Proporsi BHPBP, DAU dan DAK terhadap APBD Kabupaten/kota Jawa
Tengah 2007-2009 (persen)

Kabupaten/kota	BHPBP			DAU			DAK		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Kab.Cilacap	6,675	7,905	6,830	72,535	66,442	71,563	5,971	6,781	6,863
Kab.Banyumas	5,874	6,014	4,994	75,223	72,468	73,942	1,207	1,047	3,785
Kab.Purbalingga	3,632	5,417	5,423	75,129	67,043	66,285	6,095	7,469	7,428
Kab.Banjarnegara	5,889	5,842	4,153	71,840	70,921	73,634	7,039	8,543	9,622
Kab.Kebumen	4,511	4,292	3,799	74,570	71,960	73,938	6,650	7,752	8,591
Kab.Purworejo	4,749	5,070	4,841	74,196	72,713	73,897	6,984	7,999	9,649
Kab.Wonosobo	5,677	5,444	5,727	71,674	70,403	70,760	8,364	9,429	10,984
Kab.Magelang	4,861	5,134	4,627	71,757	70,354	71,846	6,365	5,821	9,715
Kab.Boyolali	4,574	4,462	3,862	74,649	74,440	71,394	5,814	6,912	8,516
Kab.Klaten	3,897	4,517	4,212	79,451	76,228	76,022	5,822	6,428	7,537
Kab.Sukoharjo	5,236	5,654	5,214	74,872	72,548	73,455	6,899	7,350	9,094
Kab.Wonogiri	4,253	4,312	4,437	76,662	71,183	74,384	7,476	8,394	8,515
Kab.Karanganyar	5,415	4,842	4,833	71,596	65,618	71,979	6,726	7,117	9,468
Kab.Sragen	4,221	4,086	3,113	69,351	68,533	73,607	6,037	6,749	6,423
Kab.Grobogan	7,621	6,635	6,125	75,109	75,642	78,868	1,376	2,461	3,438
Kab.Blora	12,648	11,356	12,715	69,541	67,318	68,245	6,736	7,981	7,316
Kab.Rembang	6,736	6,273	6,022	70,921	68,778	69,585	8,036	8,816	9,679
Kab.Pati	4,802	5,102	4,694	72,107	68,067	72,358	6,438	7,455	8,837
Kab.Kudus	9,338	10,730	10,569	63,246	59,452	57,373	5,728	6,105	7,277
Kab.Jepara	5,961	6,456	5,797	66,878	66,922	67,632	7,019	8,109	9,859
Kab.Demak	5,484	4,989	5,432	70,891	69,574	71,604	8,430	9,150	10,532
Kab.Semarang	4,673	6,039	4,825	69,454	65,653	80,315	6,664	7,731	8,727
Kab.Temanggung	5,010	4,918	3,399	74,411	73,022	74,332	7,587	8,350	8,842
Kab.Kendal	5,054	4,804	5,276	69,875	68,421	69,674	7,196	8,362	10,176
Kab.Batang	6,021	5,962	4,524	72,099	69,249	72,602	8,872	9,582	11,922
Kab.Pekalongan	5,132	5,809	4,776	73,832	69,050	72,591	8,337	8,696	9,266
Kab.Pemalang	5,696	5,719	4,483	77,266	76,344	81,182	1,429	1,312	1,387
Kab.Tegal	5,273	5,081	5,178	77,443	75,433	75,705	1,390	3,542	5,605
Kab.Brebes	5,800	5,480	4,871	79,082	77,482	74,212	1,242	1,118	4,063
Kota Magelang	5,482	4,893	5,137	72,405	71,080	68,441	7,035	7,745	7,979
Kota Surakarta	8,460	8,184	7,538	62,268	56,027	56,351	4,306	4,127	5,016
Kota Salatiga	6,101	5,294	5,988	70,242	57,685	67,982	7,333	7,941	9,203
Kota Semarang	15,117	17,187	14,286	50,006	47,460	50,204	0,835	1,580	3,052
Kota Pekalongan	6,897	6,677	7,459	71,256	68,111	70,337	8,663	9,066	10,259
Kota Tegal	6,619	6,145	5,889	64,231	61,071	61,893	7,212	8,144	9,696

Sumber : data diolah

Dari Tabel 1.5 maka proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tertinggi tahun 2009 adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 14,286 persen. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Sragen, yaitu sebesar 3,113 persen. Proporsi Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, yaitu sebesar 78,868 persen. Sedangkan Kota Tegal memiliki Dana Alokasi Umum terendah sebesar 61,893 persen. Dana Alokasi Khusus tertinggi adalah Kabupaten Batang sebesar 11,922 persen.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang mencukupi, penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan pembiayaan yang adil. Akibatnya yang terjadi bukan tercipta kemandirian daerah akan tetapi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar (Dewi Pusporini, 2006). Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Penentu alokasi Dana Perimbangan adalah pusat. Sering terjadi perubahan formula untuk *block grants* (DAU) dan *conditional grants* (DAK). Pemerintah daerah menggunakan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja birokrasi. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan presiden. Besar DAU setiap provinsi/kabupaten/kota tidak sama. Hal itu merupakan kendala pemerintah daerah untuk merencanakan penggunaan anggaran dalam perencanaan penyusunan anggaran secara tepat sehingga menjadi salah satu faktor kendala pencapaian *output* yang optimal.

Pemerintah daerah menjadi penerima pasif atas pengalokasian DAK meskipun peraturan perundangan memungkinkan daerah untuk secara aktif mengajukan usul. Regulasi DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga akan menghambat peningkatan *output* daerah. Pemerintah daerah mengusulkan kegiatan tertentu disertai dengan data tentang kondisi sarana prasarana bidang-bidang yang kemungkinan bisa dibiayai oleh alokasi DAK. Data tersebut menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Keuangan, dalam mengalokasikan DAK setiap bidang dan setiap daerah.

DAK sebagai sumber utama belanja modal terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan pelayanan umum sehingga *output* diharapkan meningkat sampai pada batas tertentu.

Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah maka anggaran daerah yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan semakin besar. Oleh karena itu, pengolahan keuangan daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan dan diupayakan agar penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan

efisien. Dana Perimbangan digunakan sebagai faktor modal daerah guna mendorong *output* daerah melalui dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Selain Dana perimbangan sebagai faktor modal, faktor tenaga kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi *output* suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi *output* di suatu daerah.

Tabel 1.6
Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2007-2009

Tahun	Angkatan Kerja				Sub Jumlah	
	Bekerja	%	Mencari Kerja	%		%
2006	15210931		1197244		16408175	
2007	16304058	7,186	1360219	13,613	17664277	7,655
2008	15463658	(5,155)	1227308	(9,771)	16690966	(5,510)
2009	15835382	2,404	1252267	2,034	17087649	2,377

Faktor tenaga kerja, dalam hal ini adalah angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja), merupakan salah satu faktor penentu tingkat *output*. Gambaran perkembangan jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.6 yang menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang bekerja dan mencari kerja di Jawa Tengah untuk menggerakkan perekonomian melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Secara agregat, dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah dari tahun 2006-2009 berfluktuasi. Jumlah angkatan kerja baik yang bekerja maupun mencari kerja sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2008 yang berarti telah terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut. Dari Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa perkembangan pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan pekerja di Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, faktor produksi modal yang dicerminkan dari Proporsi Dana Perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam periode 2007-2009 mengalami fluktuasi. Walaupun alokasi Dana Perimbangan sangat tinggi, akan tetapi tingkat PDRB dan pertumbuhan ekonomi masih rendah. Selain itu angkatan kerja sebagai faktor produksi tenaga kerja juga relatif rendah. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) terhadap PDRB di Jawa Tengah, serta bagaimana arah hubungan tersebut. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi pengambil kebijakan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, khususnya berkaitan dengan sektor Dana Perimbangan dan ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa di tempat dan waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Tahun 2007-2009 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah rendah. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (tabel 1.3) masih di bawah 5 persen. PDRB dari 35 kabupaten/kota hanya 14 kabupaten/kota yang memiliki tingkat PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah (tabel 1.2). Sehingga untuk meningkatkan PDRB dibutuhkan faktor modal sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai *output*. Sumber pendapatan terbesar di Jawa Tengah berasal dari Dana Perimbangan. Hal itu dapat dilihat dari besarnya alokasi proporsi Dana Perimbangan yang cukup tinggi. Akan tetapi selama tahun 2007-2009 besar proporsi Dana Perimbangan mengalami fluktuasi (tabel 1.4). Oleh karena itu, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (tabel 1.5) yang merupakan faktor modal daerah yang digunakan untuk sumber pembiayaan diharapkan mendorong aktivitas *output* sampai pada batas tertentu.

Untuk meningkatkan *output*, selain faktor modal dibutuhkan faktor tenaga kerja. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pertumbuhan daerah melalui peningkatan *output*. Dari tabel 1.6 angkatan kerja sempat mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2008. Pertumbuhan negatif ini menunjukkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2008 lebih rendah dari pertumbuhan angkatan kerja pada tahun sebelumnya. Angkatan kerja adalah orang

yang bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dilihat dari segi jumlah, jika semakin banyak angkatan kerja yang tergolong bekerja digunakan dalam proses produksi, maka semakin banyak *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Meskipun hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return*.

Dana perimbangan tahun 2007-2009 cukup besar sebagai perubahan penerimaan yang dominan atau sebagai faktor produksi modal. Dana perimbangan berperan untuk pembiayaan pembangunan. Angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) sebagai faktor tenaga kerja yang digunakan sebagai input guna mencapai tingkat *output* tertentu. Beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, ini kemudian akan membawa dampak pada pertumbuhan *output* itu sendiri.

Dari uraian di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan Dana Perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) terhadap PDRB. Peningkatan PDRB ini kemungkinan dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja). Dengan melihat pengaruh Dana Perimbangan dan pekerja kaitannya dengan PDRB di Jawa Tengah, maka dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di Jawa Tengah?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB di Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB di Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah.

Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya penelitian, khususnya analisis data panel tentang pengaruh Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan pekerja. Penelitian juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya baik dalam model, cara analisis maupun hasil analisisnya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini memberikan masukan atau bahan informasi untuk dipertimbangkan atau dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang

berkaitan dengan Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus di Jawa Tengah. Disamping itu diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dalam merumuskan kebijakan perimbangan keuangan dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dana perimbangan. Agar alokasi dana perimbangan yang cukup besar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Dan angkatan kerja khususnya golongan yang bekerja dapat dipergunakan sebagai masukan dinas ketenagakerjaan dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika Bab. Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tentang pengaruh dana perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) terhadap PDRB.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu PDRB, fungsi produksi, pendapatan daerah, teori dana perimbangan yang terdiri dari Dana BHPBP, DAU, DAK, dan angkatan kerja yang tergolong bekerja. Bab ini juga mengungkapkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : MODEL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi bagaimana penelitian pengaruh dana perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja terhadap PDRB akan dilaksanakan, menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi diskripsi dari objek penelitian berupa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, Keadaan perkembangan PDRB Jawa Tengah, Dana Perimbangan, BHPBP, DAU, DAK, dan angkatan kerja. Hasil analisis pengaruh dana perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran dari penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dan struktur struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994). Sadono sukirno menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa pada suatu negara pada suatu waktu tertentu. Menurut Robinson Tarigan (2004) ekonomi wilayah (daerah) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yakni kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah itu. Pertambahan ini diukur dalam nilai riil atau dinyatakan dalam harga konstan.

Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah menggunakan ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara negara lain (sadono sukirno, 2004). Sedangkan PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga suatu

wilayah dan wilayah lain. Menurut Faried W. (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan *output* riil. *Output* riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis region tersebut. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian faktor produksi dari kegiatan produksi di suatu wilayah berasal dari wilayah lain. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki wilayah tersebut ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Dengan kata lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran "Production Originatea". Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang

timbul di suatu wilayah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa gaji/upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan) yang mengalir antarwilayah (termasuk dari/ke luar negeri), maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dengan Produk Regional. Produk Regional adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar wilayah dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar wilayah tersebut. Dengan kata lain, Produk Regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan tahun dasar menggunakan tahun 2000. Tahun 2000 digunakan sebagai tahun dasar karena dianggap representatif untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tahun 2000 dianggap sebagai tahun yang relatif stabil setelah krisis ekonomi 1997/1998. Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92 persen dan inflasi sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan awal berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah keterpurukan akibat krisis ekonomi.

Angka-angka PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu :

1. Menurut pendekatan produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi. Unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 kelompok lapangan usaha, yaitu :

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa

2. Menurut pendekatan pendapatan

PDRB adalah merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

3. Menurut pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintahan, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah / wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

Berdasarkan cara penyajian, menurut website BPS, Produk Domestik Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

Nilai tambah yang dimaksud yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa dalam proses produksi. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Fungsi PDRB menurut BPS (2008) adalah:

- a. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu kabupaten. PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
- b. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.
- c. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sector dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sector ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- e. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menggunakan barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar.
- f. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor ekonomi.
- g. PDRB penggunaan atas dasar konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan.

- h. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.
- i. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

Dalam konteks regional kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Menurut Sadono Sukirno (2004), kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara (daerah) mempunyai kekayaan alam yang dapat dioptimalkan maka *output* dapat ditingkatkan. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara (daerah) yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut.

- b. Jumlah dan Kualitas Dari Penduduk dan Tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Menurut M. Suparmoko (2000) faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting guna meningkatkan *output*. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan

dalam proses produksi, maka *output* hasil produksi juga akan mengalami peningkatan. Tetapi hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return* atau Hukum Hasil Yang Semakin Menurun.

c. Kapital

Kapital ialah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah *output*. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang (Irawan dan M. Suparmoko, 1997). Adapun barang-barang yang termasuk kapital meliputi modal, pabrik dan alat-alat produksi, gedung dan bangunan, dan lain sebagainya.

d. Tingkat Teknologi

Teknologi merupakan cara mengolah atau menghasilkan barang dan jasa tertentu agar memiliki nilai tambah. Teknologi mempunyai hubungan dengan inovasi, yaitu penemuan baru yang telah diterapkan dalam proses produksi, seperti menemukan daerah pemasaran baru, menemukan komoditi baru, menemukan cara produksi baru, dan sebagainya (M. Suparmoko, 2000).

e. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Dalam Sadono Sukirno (2004) disebutkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius dalam pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktifitas tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun tidak dapat dicapai secara maksimal.

2.1.3 Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat *output* yang dihasilkan. Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis adalah:

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto

K = stok modal

L = tenaga kerja

A = konstanta yang merefleksikan produktivitas tenaga kerja

α = melambangkan elastisitas *output* terhadap modal, yakni Menurut Todaro (2000), persentase kenaikan PDRB yang bersumber dari 1 persen penambahan stok modal . Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan *output* selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi.

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah :

$$q = f(k, L)$$

k =stok modal

L = tenaga kerja

Fungsi produksi memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L , maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

2.1.4 Pendapatan Daerah

Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik dialihkan ke daerah, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Menurut Halim (2001) salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dari pihak masyarakat dapat dipahami oleh pihak pemerintah. Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja pembangunan sektor publik yang lebih besar. Untuk pembiayaan alokasi, sumber dana dapat diperoleh misalnya dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan menurut BPS (2008) pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak daerah

Pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

b. Retribusi daerah

Pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK):

a. Bagi Hasil Pajak

Pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPND), dan PPh pasal 21 orang pribadi dan lain-lain.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Iuran hak perusahaan hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam/panas bumi, dan lain-lain.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), dan pemerataan kemampuan fiskal antar antar daerah dalam rangka membantu

kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.

3. Lain-lain pendapatan yang Sah

Penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya dana perimbangan, diharapkan akan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.

2.1.5.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (bukan pajak). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

a. Dana Bagi hasil pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), dan

pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB. DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB untuk daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan yang dilaksanakan secara mingguan. Penyaluran PBB dan BPHTB bagian pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*) (M. Suparmoko, 2001).

Pengenaan pajak atas suatu obyek tertentu, dapat mengakibatkan dampak positif dan negatif dalam perekonomian. Misalnya pengenaan pajak perseorangan (pajak yang pengenaannya sama pada suatu kelompok tertentu, tanpa mengingat aktivitasnya). Bagi pelaku ekonomi pemerintah, pajak perseorangan berpengaruh positif (memberi sumbangan) pada PDRB penerimaan. Sedangkan bagi pelaku ekonomi rumah tangga, pajak perseorangan berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, sehingga berpengaruh negatif pada PDRB. Sementara bagi pelaku ekonomi

perusahaan, penurunan tingkat tabungan mengakibatkan penurunan dalam jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan (berdampak negatif pada PDRB penerimaan).

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Perhitungan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil sumber daya alam dilakukan oleh Departemen Teknis (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan) yang menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan Dana Bagi Hasil sumber daya alam setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dan satu daerah. Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait. Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar penghitungan Dana Bagi Hasil sumber daya alam oleh menteri teknis. Ketetapan menteri teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan yang kemudian menetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam untuk masing-masing daerah.

Penghitungan realisasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme kecocokan data antara pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Teknis dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan serta antara departemen teknis dengan Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam

berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi atau gas bumi. Perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi atau gas bumi dan departemen teknis.

Penyaluran Dana Bagi Hasil sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara triwulanan yang dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

2.1.5.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan alokasinya untuk pemerataan kemampuan (*horizontal imbalances*) keuangan antar daerah.

Alokasi DAU digunakan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Dalam UU No. 33/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaa kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

DAU terdiri dari dua:

1. DAU untuk provinsi.

DAU provinsi ditetapkan dalam APBN tiap tahunnya. Jumlah DAU untuk Provinsi sebesar 10 persen dari seluruh DAU yang diserahkan ke daerah.

2. DAU untuk kabupaten/kota.

Besarnya DAU untuk kabupaten/kota ini sebesar 90 persen dari total DAU yang diserahkan ke daerah-daerah.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar.

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Dimana:

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi dasar

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Untuk perhitungan kapasitas fiskal suatu daerah, digunakan formula:

$$KF = PAD + DBH$$

Penghitungan Dana Alokasi Umum dilakukan oleh Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

1. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten kota dengan jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variable jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.
3. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi

dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Formula DAU tersebut digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Sampai dengan tahun anggaran 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, provinsi mendapat dana penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dari perekonomian negara.

DAU disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.

2.1.5.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan pertumbuhan antardaerah dan pelayanan antarbidang. DAK sangat berpengaruh dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan

kepada pemerintah daerah. DAK dititikberatkan di tiga bidang penerima yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Penghitungan Dana Alokasi Khusus dilakukan oleh Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

1. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dan program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK.
3. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penentuan daerah yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK

masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dana DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Alokasi DAK tiap daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

2.1.6 Hubungan Dana Perimbangan dengan PDRB

Fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana k merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Untuk meningkatkan *output* maka dibutuhkan sumber pembiayaan (*kapital*). Salah satu pembiayaan berasal dari transfer pemerintah yaitu dari dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK. Dan Perimbangan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk belanja pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan *output*.

Menurut hasil penelitian Bintoro Rianto (2002) hasil penelitian untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. penelitian menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan akan meningkatkan *output* tiap daerah di Indonesia. Dan kemudian diperkuat oleh penelitian dari Pusporini Dewi (2006) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap PDRB walaupun pengaruhnya sangat kecil.

2.1.7 Angkatan Kerja

Berlakunya UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pada 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Menurut P. Simanjuntak (1998) Indonesia tidak menentukan batas usia maksimum tenaga kerja, hal ini dikarenakan Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Tenaga kerja sendiri dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan Kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur dan mencari kerja. Besarnya penyediaan atau *supply* terhadap faktor produksi tenaga kerja dalam masyarakat merupakan jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk kegiatan memproduksi barang dan jasa. Dan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya, angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan yang menganggur dan mencari kerja. Menurut J. Simanjuntak (1998), golongan yang bekerja adalah mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan dinamakan pencari kerja atau penganggur.

P. Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Produktivitas pekerja dapat diukur dengan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio antara nilai tambah yang dihasilkan dan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marginal pekerja, yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap

kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. Dengan kata lain produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

2.1.8 Hubungan Pekerja dengan PDRB

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(k, L)$ dimana k merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak

angkatan kerja yang tergolong bekerja yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan latar belakang dari penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pekerja berpengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan penelitian terdahulu Joko Waluyo (2007) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal yang sama disampaikan oleh penelitian Bintoro Arianto (2002) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB menurut penelitian Amin Pujiati.

Berdasarkan penelitian Amin Pujiati (2008) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, angkatan kerja yang tergolong bekerja berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB. Dan sesuai dengan penelitian Bintoro Arianto (2002) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dana perimbangan dan angkatan kerja sebagai faktor produksi barang dan jasa yang nantinya akan mendorong peningkatan *output* sampai batas tertentu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Joko Waluyo (2007) dalam penelitiannya berjudul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah dari tahun 2000 sampai dengan 2005 yang di proksi dari PDRB. Model yang digunakan adalah model analisis Ekonometrika persamaan silmultan dengan menggunakan data panel antar propinsi. Dari penelitian tersebut menunjukkan dampak desentralisasi fiskal terhadap output ekonomi melalui berbagai mekanisme transmisi yaitu: melalui mekanisme pemberian dana bagi hasil pajak (DBHP), dana bagi hasil sumber daya alam (DBHSDA), melalui mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Dari kedua mekanisme transmisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: Daerah-daerah pusat industri dan jasa yang diuntungkan dengan kebijakan ini. Daerah kaya SDA (Riau, dan Kaltim) yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Disamping itu kebijakan bagi hasil SDA memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai pemerata fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong output daerah. Kebijakan DAU sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah. Dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antardaerah lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan dengan dengan pertumbuhan *output* yang lebih tinggi di KTI

dan berada diatas rata-rata nasional. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling rendah pertumbuhan ekonominya dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal.

2. Bintoro Rianto (2002) “Studi Transfer Pemerintah Dalam Era Desentralisasi di Indonesia: Kasus Dana Perimbangan”. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui apakah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (DAU, DAK, BHP, BHSDA) akan dapat meningkatkan output melalui PDRB sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, mendorong investasi dan konsumsi swasta daerah. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan output daerah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan akan memberikan peningkatan output untuk tiap daerah di Indonesia
3. Dewi Pusporini (2006) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 2001-2003”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dari sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Bertujuan mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, pendapatan asli daerah,

pendapatan perkapita, jumlah penduduk. Analisis ini menggunakan analisis model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil perhitungan dan pengujian Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli daerah (PAD) mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada konsistensi arah hubungan, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Amin Pujiati (2008) yang melakukan penelitian pada Karesidenan Semarang dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”. Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja (TK), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan PDRB. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi dengan model data panel menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) dengan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan hanya pertumbuhan ekonomi, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan angkatan kerja. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini karena keterbatasan ketersediaan data. Penelitian ini menggunakan tahun yang lebih baru yaitu 2007 sampai 2009. Hal itu dikarenakan untuk pembaharuan penelitian yang sudah dilakukan. Berikut ini adalah ringkasan kajian empiris oleh beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan penelitian:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul/Penulis	Tujuan	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Joko Waluyo. 2007. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia". Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. JEL	Menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah.	PDRB DBHP DBHSDA DAU	Ekonometrika persamaan simultan dengan menggunakan data panel antar propinsi	Desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan <i>output</i> relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.
Bintoro Ariyanto. 2002. Studi Transfer Pemerintah Dalam Era Desentralisasi di Indonesia: Kasus Dana Perimbangan. <i>Disertasi Tidak Dipublikasikan</i> , Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia	Mengetahui apakah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (DAU, DAK, BHP, BHSDA) akan dapat mendorong output, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, mendorong investasi dan konsumsi swasta daerah	Pertumbuhan ekonomi diproksi dari PDRB 10 persamaan perilaku dan 9 persamaan identitas yang menunjukkan hubungan antar variabel makro ekonomi dengan variabel keuangan daerah.	Proyeksi dan Simulasi model. model ekonometrika dan ekonomi dalam simulasi proyeksi dan simulasi kebijakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupa Dana Perimbangan dengan menggunakan variabel eksogen yang terdiri dari BHP, BHSDA, DAK, DAU dan DP.	Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat PDRB. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan <i>output</i> melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan.

<p>Dewi Pusporini. 2006. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 2001-2003. <i>Disertasi Tidak Dipublikasikan</i>, Program Studi Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia</p>	<p>Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dari sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di Luar Jawa-Bali.</p>	<p>Dependen : Pertumbuhan ekonomi Independen: Dana perimbangan Pendapatan asli daerah Pendapatan perkapital Jumlah penduduk</p>	<p>Analisis model regresi berganda</p>	<p>Dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun pengaruhnya sangat kecil. Estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapital dan jumlah penduduk menunjukkan variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antara daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan.</p>
<p>Amin Pujianti. 2008. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal". <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan</i>. Kajian ekonomi berkembang hal 61-71</p>	<p>menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah provinsi sub di Semarang.</p>	<p>variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan PDRB Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, DBH, angkatan kerja</p>	<p>regresi dengan model data panel menggunakan metode <i>Generalized Least Squares (GLS)</i> dengan pendekatan <i>fixed effect</i>.</p>	<p>Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap output sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Dana perimbangan sebagai kontribusi utama dalam pendapatan daerah, memberikan peran penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi daerah. Besar dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dipertimbangkan secara matang sehingga belanja pemerintah daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dapat meningkatkan *output* sampai pada batas tertentu. Hal itu sesuai dengan penelitian Dewi Pusporini (2006) bahwa desentralisasi fiskal berujung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah. Salah satu indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah PDRB. Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu langkah utamanya dapat ditempuh melalui peningkatan *output* atau melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Atau dengan kata lain Dana perimbangan dialokasikan untuk membiayai infrastruktur ekonomi sehingga sarana dan prasarana menunjang kegiatan produksi barang dan jasa yang nantinya akan mendorong peningkatan *output* sampai pada batas tertentu.

Selain itu adalah peran penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam hal ini adalah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Jika semakin banyak jumlah angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka akan semakin banyak *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi tersebut. Meskipun hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return*.

Berdasarkan penelitian terdahulu Amin Pujiati (2008) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, angkatan kerja yang tergolong bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dan sesuai dengan penelitian Bintoro Arianto (2002) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mendorong peningkatan *output* daerah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan memberikan dampak terhadap *output* untuk tiap daerah di Indonesia. Kemudian diperkuat dari penelitian Amin Pujiati (2010) bahwa angkatan kerja sebagai salah satu faktor produksi akan meningkatkan *output* sampai pada batas tertentu.

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis adalah:

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha} \dots\dots\dots(2.1)$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto

K = stok modal

L = tenaga kerja

A = konstanta

α = melambangkan elastisitas *output* terhadap modal

Dana perimbangan sebagai faktor produksi modal dan angkatan kerja sebagai faktor produksi tenaga kerja guna menunjang kegiatan produksi barang

dan jasa yang nantinya akan mendorong peningkatan *output* sampai pada batas tertentu. Maka fungsi produksi :

$$Q = f(k, L) \dots \dots \dots (2.2)$$

k = BHPBP, DAU, DAK

L = Pekerja

Sehingga secara matematis kerangka pemikiran ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = f(\text{BHPBP, DAU, DAK, L}) \dots \dots \dots (2.3)$$

Y = PDRB

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

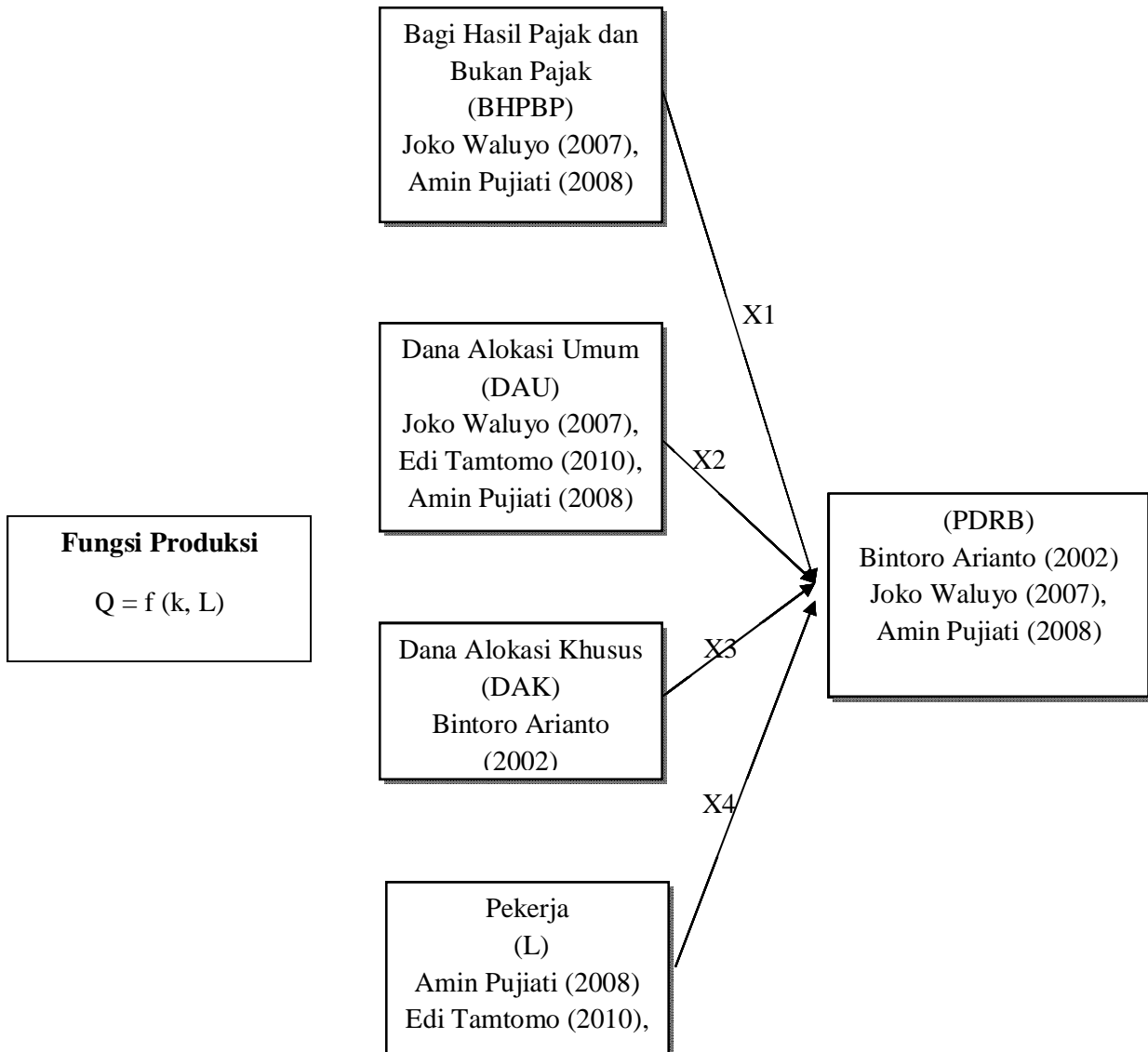
DAU = Dana Alokasi Khusus

DAK = Dana Alokasi Khusus

L = pekerja

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proporsi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut (J.Supranto, 1998).

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
2. Diduga variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
3. Diduga variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
4. Diduga variabel pekerja (L) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen yaitu : PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebagai variabel dependen dan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan pekerja (L) sebagai variabel independen.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, spesifikasi kegiatan, atau memberi suatu operasional yang dibutuhkan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari variabel yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. **PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Menurut BPS (2008), secara umum PDRB memberikan gambaran kinerja ekonomi makro suatu wilayah dari waktu ke waktu. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009.

2. **Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Nilai dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak ditambah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). Data dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah data sekunder dan diambil dari ringkasan Realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan data publikasi. Satuan variabel Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ini adalah rupiah.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD dialokasikan untuk mendanai atau melaksanakan fungsi layanan dasar secara umum kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan alokasinya untuk pemerataan kemampuan (*horizontal imbalances*) keuangan daerah. Nilai dari Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diambil dari ringkasan Realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan data publikasi. Satuan dari variabel Dana Alokasi Umum adalah rupiah.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Nilai dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diambil dari ringkasan Realisasi APBD kabupaten/kota se-

Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan data publikasi. Satuan variabel Dana Alokasi Khusus adalah rupiah.

5. Pekerja (L)

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh J. Simanjuntak (1998), angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan yang mencari kerja. Data angkatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja). Data angkatan kerja diambil dari data angkatan kerja yang tergolong bekerja penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu di Jawa Tengah tahun 2007-2009, dinyatakan dalam satuan orang.

6. Dummy kabupaten/kota

Penggunaan *Dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar wilayah (kabupaten/kota) dalam tiga tahun periode penelitian terhadap variabel PDRB. Secara administratif Provinsi Jawa tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota. Untuk penggunaan variabel *dummy*, diperlukan adanya *benchmark*, yaitu wilayah yang menjadi pembanding untuk wilayah lainnya. Dalam Gujarati (2003), pemilihan wilayah *benchmark* tidak menggunakan kriteria tertentu, setiap wilayah bebas untuk dijadikan *benchmark*. Akan tetapi kriteria yang dapat digunakan sebagai *benchmark* adalah wilayah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap wilayah lainnya dari berbagai sisi khususnya ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, maka diputuskan bahwa *benchmark* (wilayah pembanding) adalah Kota Semarang. Sehingga, dari 35 kabupaten/kota akan diambil 34 wilayah untuk dijadikan variabel *dummy* dan 1

benchmark. Variabel dummy itu antara lain Kabupaten Cilacap (D_1), Kabupaten Banyumas (D_2), Kabupaten Purbalingga (D_3), Kabupaten Banjarnegara (D_4), Kabupaten Kebumen (D_5), Kabupaten Purworejo (D_6), Kabupaten Wonosobo (D_7), Kabupaten Magelang (D_8), Kabupaten Boyolali (D_9), Kabupaten Klaten (D_{10}), Kabupaten Sukoharjo (D_{11}), Kabupaten wonogiri (D_{12}), Kabupaten Karanganyar (D_{13}), Kabupaten Sragen (D_{14}), Kabupaten Grobogan (D_{15}), Kabupaten Blora (D_{16}), Kabupaten Rembang (D_{17}), Kabupaten Pati (D_{18}), Kabupaten Kudus (D_{19}), Kabupaten Jepara (D_{20}), Kabupaten Demak (D_{21}), Kabupaten Semarang (D_{22}), Kabupaten Temanggung (D_{23}), Kabupaten Kendal (D_{24}), Kabupaten Batang (D_{25}), Kabupaten Pekalongan (D_{26}), Kabupaten Pemalang (D_{27}), Kabupaten Tegal (D_{28}), Kabupaten Brebes (D_{29}), Kota Magelang (D_{30}), Kota Surakarta (D_{31}), Kota Salatiga (D_{32}), Kota Pekalongan (D_{34}), Kota Tegal (D_{35}).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu.

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan data deret berkala (*time-series*) dan antar individu (*cross-section*). Data *time-series* menggunakan data 3 tahunan dimulai dari tahun 2007-2009 dan data *cross-section* yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik panel data dengan menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series* sehingga menghasilkan 105 observasi. Data panel memberikan beberapa

keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series*. Jika *data cross section* nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sample pada suatu waktu. Dalam panel data, unit *cross section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu (Gujarati dan Poter, 2009:637, dalam firmansyah, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasar harga konstan 2000 tahun 2007-2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum diperoleh dari data publikasi ringkasan realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
3. Data angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) diperoleh dari data penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu di Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka 2007-2009, publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
4. Buku-buku dan literatur literatur yang mendukung dalam penelitian.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya). Tahap analisis kuantitatif terdiri dari estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, regresi persamaan linear berganda dengan menggunakan metode *fixed effec*, deteksi penyimpangan asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika.

3.3.1 Spesifikasi Model

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = f(BHPBP, DAU, DAK, L)$$

dimana:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

BHPBP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

L = pekerja

3.3.2 Analisis Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis ekonometri. Menurut Samuelson, dalam Damodar Gujarati ekonometrika didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang sebenarnya (aktual) yang didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dari teori dan pengamatan, dihubungkan dengan metode inferensi yang sesuai. Ekonometrika merupakan

campuran dari teori ekonomi, ekonomi matematis, statistika ekonomi, dan statistika matematis.

Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati.

Menurut Mudrajat Kuncoro, peneliti terkadang menemukan suatu persoalan mengenai ketersediaan data (*data availability*) untuk mewakili variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Misalnya, peneliti menemukan data *series* yang pendek sehingga proses pengolahan data *time series* tidak dapat dilakukan berkaitan dengan persyaratan jumlah data minimal (>30 sample). Selain itu, peneliti menemukan bentuk data dengan jumlah unit *cross section* yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan proses pengolahan data *cross section* untuk mendapatkan informasi perilaku dari model yang diteliti. Dalam teori ekonometrika, kedua kondisi itu dapat diatasi dengan data panel (*pooled data*) agar dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih baik atau efisien dengan terjadinya peningkatan jumlah observasi yang berimplikasi terhadap peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*).

Terdapat beberapa keunggulan dari penggunaan data panel dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section*. Pertama, dapat memberikan sejumlah data yang lebih besar, menaikkan derajat kebebasan, mengurangi kolinearitas diantara variabel penjelas, sehingga diperoleh estimasi ekonometrik yang efisien.

Kedua, memberikan informasi yang penting bagi peneliti yang tidak dapat diberikan jika menggunakan data *time series* dan *cross section*. Menurut Hsiao (1986) dalam Firmansyah (2009), keunggulan penggunaan panel data adalah :

1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
2. Data panel memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* dan *time series* saja.
3. Data panel akan memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan dengan data *cross section*.

Menurut Gujarati (2003), terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan model panel antara lain:

1. Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data akan rentan dari heterogenitas. Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
2. Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
3. Penggunaan data panel, mampu meminimasi bias yang dihasilkan jika kita mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Keuntungan lain dari penggunaan data panel adalah penyatuan informasi dari data *cross section* dan *time series* yang akan mengurangi permasalahan yang

timbul akibat hilangnya variabel. Dalam data panel, hilangnya suatu variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data *time series*. Selain itu penggunaan data yang tidak lengkap (*unbalanced data*) tidak akan mengurangi ketajaman estimasi karena penggunaan dummy dalam metode *Least Square Dummy Variable (LSDV)* akan mengatasi data yang berantakan.

Wing Wahyu Winarno (2007) menjelaskan bahwa, dalam menganalisis data panel, teknik paling sederhana mengasumsikan data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua obyek pada semua waktu. Metode ini sering disebut dengan *common effect*. Kelemahan asumsi tersebut adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap obyek saling berbeda, bahkan satu obyek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi obyek tersebut pada waktu yang lain.

Dalam analisis model panel data dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap(*fixed effect*)

Asumsi intersep dan slop konsisten dalam panel data sulit terpenuhi. Untuk mengatasi masalah tersebut dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variabel*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda – beda baik lintas unit (*cross section*) maupun anatr waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini disebut model efek tetap (*fixed effect*).

Fixed effect adalah suatu obyek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk membedakan satu obyek dengan obyek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*) sehingga model ini dikenal dengan *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*.

Penggunaan variabel *dummy* tergantung pada tujuan analisisnya, bila variabel *dummy* digunakan untuk melihat perbedaan konstanta antar waktu, maka data disusun berdasarkan waktu observasi (*stacked by date*). Namun bila variabel *dummy* digunakan untuk melihat perbedaan konstanta antar obyek, maka data disusun berdasarkan obyek observasi (*stacked by cross*). Pada berbagai penelitian, obyek yang digunakan sebagai *benchmark* pada umumnya adalah obyek yang memiliki karakteristik yang paling baik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan oleh peneliti.

2. Pendekatan efek acak (*random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) akan mengakibatkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*). Dalam metode *random effect*, unit *cross section* yang dipilih dalam penelitian diambil dengan sistem acak.

Menurut Jidge (dikutip dari Gujarati, 2003 hal.650) ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

1. Apabila jumlah time-series (t) besar sedangkan jumlah *cross-section* (n) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga pilihan dapat didasarkan atas perhitungan komputer mana diantara kedua model yang lebih meyakinkan. Pada kasus ini, model *fixed effect* (FEM) mungkin dapat dipilih.
2. Apabila n besar dan t kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Pada kasus yang lebih jauh, kesimpulan statistik tergantung dari *unit cross-section* yang diobservasi dalam sampel. Jadi, apabila lebih meyakini bahwa *unit cross-section* yang kita pilih dalam penelitian secara acak (random) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa *unit cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
3. Apabila komponen error ε_i individual berkorelasi maka penaksiran *random effect* akan bias dan penaksiran *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila n besar dan t kecil, dan apabila asumsi yang mendasari random effect dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

Fixed Effect Model (FEM) salah satunya mengasumsikan bahwa persamaan regresi memiliki slope konstan sedangkan intersep bervariasi antar individual. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan

memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Metode Fixed Effect Model*, dengan menggunakan *cross section dummy variabel (dummy wilayah)* 34 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, dengan Kota Semarang sebagai benchmark. Sehingga terdapat 34 *intercept* yang berbeda-beda antar wilayah yang menunjukkan karakteristik masing-masing wilayah. *Intrcept* masing-masing wilayah itu yang nantinya akan diinterpretasi secara individual terhadap variabel yang digunakan dalam model (individual effect). Model *Fixed Effect* dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut :

a. Variabel Dependen

$$Y = \text{PDRB}$$

b. Variabel Independen

Variabel Independen terdiri dari :

BHPBP = Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

L = pekerja

$PDRB = f(BHPBP, DAU, DAK, L, D)$

$$\begin{aligned}
 PDRB = & \alpha_1 + \alpha_2 BHPBP_{it} + \alpha_3 DAU_{it} + \alpha_4 DAK_{it} + \alpha_5 L_{it} + \gamma_1 D_{1it} - \gamma_2 D_{2it} - \gamma_3 D_{3it} - \\
 & \gamma_4 D_{4it} - \gamma_5 D_{5it} - \gamma_6 D_{6it} - \gamma_7 D_{7it} - \gamma_8 D_{8it} - \gamma_9 D_{9it} - \gamma_{10} D_{10it} - \gamma_{11} D_{11it} - \gamma_{12} D_{12it} - \\
 & \gamma_{13} D_{13it} - \gamma_{14} D_{14it} - \gamma_{15} D_{15it} - \gamma_{16} D_{16it} - \gamma_{17} D_{17it} - \gamma_{18} D_{18it} - \gamma_{19} D_{19it} - \gamma_{20} D_{20it} - \\
 & \gamma_{21} D_{21it} - \gamma_{22} D_{22it} - \gamma_{23} D_{23it} - \gamma_{24} D_{24it} - \gamma_{25} D_{25it} - \gamma_{26} D_{26it} - \gamma_{27} D_{27it} - \gamma_{28} D_{28it} - \\
 & \gamma_{29} D_{29it} - \gamma_{30} D_{30it} - \gamma_{31} D_{31it} - \gamma_{32} D_{32it} - \gamma_{34} D_{34it} - \gamma_{35} D_{35it} - E_{it}
 \end{aligned}$$

Dimana:

$PDRB$ = PDRB harga konstan

$BHPBP$ = Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

L = pekerja

D_1 = dummy Kabupaten Cilacap

D_2 = dummy Kabupaten Banyumas

D_3 = dummy Kabupaten Purbalingga

D_4 = dummy Kabupaten Banjarnegara

D_5 = dummy Kabupaten Kebumen

D_6 = dummy Kabupaten Purworejo

D_7 = dummy Kabupaten Wonosobo

D_8 = dummy Kabupaten Magelang

D_9 = dummy Kabupaten Boyolali

D_{10} = dummy Kabupaten Klaten

D_{11} = dummy Kabupaten Sukoharjo

- D₁₂ = dummy Kabupaten wonogiri
- D₁₃ = dummy Kabupaten Karanganyar
- D₁₄ = dummy Kabupaten Sragen
- D₁₅ = dummy Kabupaten Grobogan
- D₁₆ = dummy Kabupaten Blora
- D₁₇ = dummy Kabupaten Rembang
- D₁₈ = dummy Kabupaten Pati
- D₁₉ = dummy Kabupaten Kudus
- D₂₀ = dummy Kabupaten Jepara
- D₂₁ = dummy Kabupaten Demak
- D₂₂ = dummy Kabupaten Semarang
- D₂₃ = dummy Kabupaten Temanggung
- D₂₄ = dummy Kabupaten Kendal
- D₂₅ = dummy Kabupaten Batang
- D₂₆ = dummy Kabupaten Pekalongan
- D₂₇ = dummy Kabupaten Pemasang
- D₂₈ = dummy Kabupaten Tegal
- D₂₉ = dummy Kabupaten Brebes
- D₃₀ = dummy Kota Magelang
- D₃₁ = dummy Kota Surakarta
- D₃₂ = dummy Kota Salatiga
- D₃₄ = dummy Kota Pekalongan
- D₃₅ = dummy Kota Tegal

- i = cross section
 t = time series
 α_1 = intercept benchmark
 $\gamma_1 \dots \gamma_{35}$ = intercept dummy
 E = error

3.3.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data dideteksi sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model tersebut harus bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hal itu sesuai dengan Gujarati (2003), sebuah model penelitian secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi deteksi asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi, deteksi multikolinearitas, deteksi autokorelasi, deteksi heteroskedastisitas dan deteksi normalitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.3.3.1 Deteksi Multikolonearitas

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati dalam buku Ekonometrika (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi

kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Deteksi multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Penelitian ini akan menggunakan *auxiliary regressions* atau *kliens's rule of thumb* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

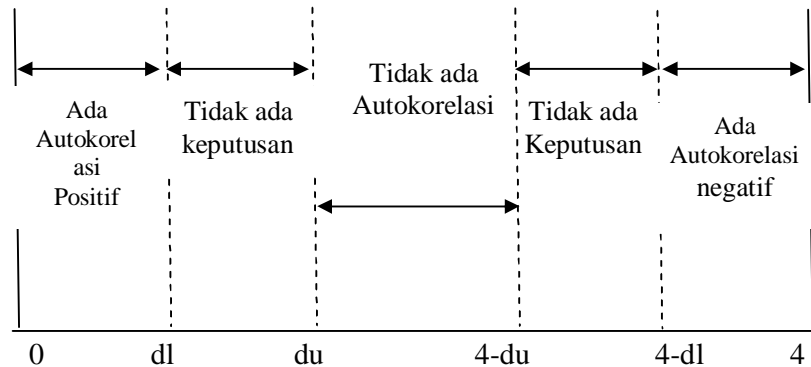
3.3.3.2 Deteksi Autokorelasi

Asumsi lain dari model linear klasik adalah bahwa tidak ada autokorelasi atau kondisi yang berurutan di antara gangguan atau disturbansi e_1 yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi. Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut deret waktu atau deret ruang (*data cross-sectionnal*). Secara sederhana dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur distribusi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 2003)

Penelitian ini akan menggunakan uji *Durbin Watson* untuk melihat gejala autokorelasi. Langkah-langkah deteksi autokorelasi dengan *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan ketentuan
 H_0 : Tidak ada autokorelasi (positif/negatif)
 H_1 : Ada autokorelasi (positif/negatif)
2. Menghitung model dan melihat nilai *Durbin-Watson* hitung dari hasil estimasi model.
3. Menghitung *Durbin-Watson* kritis yang terdiri dari nilai kritis dari batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) dengan menggunakan jumlah data (n), jumlah variabel independen/bebas (k) serta tingkat signifikansi tertentu (α)
4. Nilai D_w hitung dibandingkan dengan D_w kritis dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:
 - a Bila nilai D_w statistik terletak antara $0 < d < d_l$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
 - b Bila nilai D_w statistik terletak antara $4 - d_l < d < 4$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
 - c Bila nilai D_w statistik terletak antara $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
 - d Ragu – ragu tidak ada autokorelasi positif bila $d_l \leq d \leq d_u$.
 - e Ragu – ragu tidak ada autokorelasi negatif bila $d_u \leq d \leq 4 - d_l$

Gambar 3.1
Aturan Membandingkan Uji *Durbin-Watson* dengan Tabel Durbin Watson



Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2009).

3.3.3.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah nilai residual atau error μ dalam model regresi adalah tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi bias homoskedastisitas yaitu nilai residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksiran OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksiran tadi tidak lagi efisien baik dalam sample kecil maupun sample besar. Menurut Gujarati(1993) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi bias dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

Penelitian ini menggunakan uji park dan uji glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji park pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model, park menggunakan $\ln(\text{residu}^2)$

sebagai variabel dependen. Sedangkan uji glejser pada prinsipnya variabel dependen diganti dengan nilai absolut residual. Jika t-statistik $>$ t-tabel maka terdapat heteroskedastisitas, jika t-statistik $<$ t-tabel maka tidak ada heteroskedastisitas. Selain itu dapat dilihat melalui nilai probabilitas. Jika nilai prob $>$ 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas, jika nilai prob $<$ 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.

3.3.3.4 Deteksi Normalitas

Salah satu asumsi dalam penerapan OLS untuk regresi linier klasik bahwa distribusi probabilitas dari gangguan u memiliki nilai rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini OLS estimator atau penaksiran akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum.

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (E_{it}) antara lain *Jarque Bera test* (J-B test) dan metode grafik. Penelitian ini menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menggunakan skewness dan kurtosis. Bila nilai J-B hitung $>$ nilai X^2 (*Chi Square*) tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal dapat ditolak. Bila nilai J-B hitung $<$ nilai X^2 (*Chi Square*) tabel, maka yang menyatakan bahwa residual u berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai J-B hitung adalah dengan mendapatkan nilai *skewness* dan *kurtosis*, kemudian mendapatkan J-B hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$JB_{hit} = \frac{n}{6} \left[s^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

Dimana :

n = Jumlah observasi

S = *Skewness* (Kemencengan)

K = *Kurtosis* (Keruncingan)

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Selain deteksi penyimpangan asumsi klasik, juga dilakukan uji hipotesis yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji hipotesis dilakukan dengan pengujian koefisien regresi secara serentak atau bersama-sama (uji F) dan pengujian koefisien regresi secara parsial atau individual (uji t).

3.3.4.1 Uji F

Uji f digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

H_0 : $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 = 0$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \neq 0$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada tingkat signifikansi 5 persen maka kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada tingkat signifikansi 5 persen, pengujian dapat dilihat dari nilai Probability value (sig).

- a. Jika nilai probability value $<$ tingkat signifikansi (5 persen), artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probability value $>$ tingkat signifikansi (5 persen), artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.4.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \alpha_2 = 0$ tidak ada pengaruh variabel BHPBP secara individual terhadap PDRB.
 $H_1 : \alpha_2 > 0$ ada pengaruh positif variabel BHPBP secara individual terhadap PDRB.
2. $H_0 : \alpha_3 = 0$ tidak ada pengaruh variabel DAU secara individual terhadap PDRB.

$H_1 : \alpha_3 > 0$ ada pengaruh positif variabel DAU secara individual terhadap PDRB.

3. $H_0 : \alpha_4 = 0$ tidak ada pengaruh variabel DAK secara individual terhadap PDRB.

$H_1 : \alpha_4 > 0$ ada pengaruh positif variabel DAK secara individual terhadap PDRB.

4. $H_0 : \alpha_5 = 0$ tidak ada pengaruh variabel pekerja secara individual terhadap PDRB.

$H_1 : \alpha_5 > 0$ ada pengaruh positif variabel pekerja secara individual terhadap PDRB.

Dengan demikian keputusan yang diambil pada tingkat signifikansi (5 persen) adalah:

- a. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Pada tingkat signifikansi 5 persen, pengujian dapat dilihat dari nilai Probability value (sig).

- a. Jika nilai probability value $<$ tingkat signifikansi (5 persen), artinya variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai probability value > tingkat signifikansi (5 persen), artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Nachrowi (2006), koefisien determinasi atau R^2 (*R-square*) digunakan untuk menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Sedangkan menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Akan tetapi ada kemungkinan penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R^2* .

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross-section*) relatif

rendah karena ada variansi yang besar antar pengamatan. Data runtut waktu (*time-series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.